



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 171 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
36. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 156 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 82 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 82);
37. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun berpedoman pada :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 5 Agustus 2022



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 171

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2017 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor.10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2012 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai arahan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi dengan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Memberikan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi beserta pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berasal dari berbagai sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
5. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup;

1.4. Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi uraian tentang Latar Belakang proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan hubungannya dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, dengan Rencana Kerja Kementrian Lingkungan Hidup dan dengan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota. Disamping itu juga dijelaskan Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renja Tahun 2023.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab II Menjelaskan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis

kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab III menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2022 dapat disajikan uraian hasil pengukuran kinerja yang mengarah pada kebijakan program lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, selanjutnya dapat diuraikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)
Kabupaten Ngawi

nama PD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
03.04.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase layanan pengelolaan persampahan	24,98%	NA	24,88%	24,42%	98,15	24,88%	24,88%	100
03.04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengelolaan persampahan disediakan	2 Unit	NA	1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100
03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Luasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	400 m ²	NA	NA	NA	NA	400 m ²	400 m ²	100
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
11.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	NA	100%	100%	100	100%	100%	100
11.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	100%	NA	100%	100%	100	100%	100%	100
11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun	4 Dokumen	NA	8 Dokumen	8 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	5 Dokumen	NA	6 Dokumen	6 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	
11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	-	NA	20 Dokumen	20 Dokumen	100	-	-	-
11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	NA	100%	100%	100	100%	100%	100
11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	3966 Kali	NA	NA	NA	100	3966 Kali	3966 Kali	100
		Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 Dokumen	NA	26 Dokumen	26 Dokumen		26 Dokumen	26 Dokumen	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100%	NA	100%	100%	100	100%	100%	100
1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	800 Orang	NA	1000 Orang	1000 Orang	100	800 Orang	800 Orang	100
1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	NA	100%	100%	100	100%	100%	100
1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	NA	100%	100%	100	100%	100%	100
1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan yang disediakan	312 Kotak	NA	616 Kotak	616 Kotak	100	312 Kotak	312 Kotak	100
		Jumlah air isi ulang yang disediakan	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	12200 Lembar	8310 Lembar	17950 Lembar	17950 Lembar	100	12200 Lembar	12200 Lembar	100
		Jumlah barang yang digandakan	2995 Lembar	30000 Lembar	2396 Lembar	2396 Lembar		2995 Lembar	2995 Lembar	
		Jumlah iklan/publikasi media cetak	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/diikuti	10 Kali	NA	14 Kali	14 Kali	100	10 Kali	10 Kali	100
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri/diikuti	-	NA	-	-		-	-	
1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	NA	100%	100%	100	100%	100%	100
1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayar	24 Rekening	24 Rekening	24 Rekening	24 Rekening	100	24 Rekening	24 Rekening	100
		Jumlah rekening listrik yang dibayar	240 Rekening	24 Rekening	240 Rekening	240 Rekening		240 Rekening	240 Rekening	
		Jumlah rekening air yang dibayar	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening		36 Rekening	36 Rekening	
		Jumlah rekening internet yang dibayar	12 Rekening	NA	NA	NA		12 Rekening	12 Rekening	
1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	123 Buah	458 Buah	126 Buah	126 Buah	100	123 Buah	123 Buah	100
		Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	132 Buah	524 Buah	124 Buah	124 Buah		132 Buah	132 Buah	
		Jumlah pembayaran jasa kebersihan	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali		12 Kali	12 Kali	
1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor	96 Kali	282 Kali	288 Kali	288 Kali	100	96 Kali	96 Kali	100
		Jumlah pembayaran lembur	NA	NA	NA	NA		NA	NA	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	NA	100%	100%	100	100%	100%	100
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan jabatan	1 Kali	NA	1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	1 Kali	100
		Jumlah kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya	1 Unit	NA	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	120 Kali	NA	57 Kali	57 Kali	100	120 Kali	120 Kali	100
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	67 Unit	NA	66 Unit	66 Unit		67 Unit	67 Unit	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	22 Kali	NA	22 Kali	22 Kali	100	22 Kali	22 Kali	100
02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	70%	NA	70%	70%	100	70%	70%	100
02.2.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Lingkungan Hidup dan yang disusun	1 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan RRPLH Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,62	NA	56,57	53,70	94,93	56,62	56,62	100
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,47	NA	84,37	83,99	99,55	84,47	84,47	
03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sampel pengujian kualitas air yang memenuhi baku mutu dengan parameter BOD, COD, TSS, DO, fosfat, pH, nitrat dan total coliform	28,57%	NA	NA	NA	NA	28,57%	28,57%	100
		Persentase sample pengujian kualitas udara yang memenuhi baku mutu dengan parameter NO2 dan SO2	75%	NA	NA	NA		75%	75%	
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah koordinasi yang dilakukan	10 Kali	NA	NA	NA	NA	10 Kali	10 Kali	100
		Jumlah alat pemantauan yang diadakan	1 Unit	NA	NA	NA		1 Unit	1 Unit	
		Jumlah sample pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah) yang diuji dan di analisa	36 Sampel	NA	NA	NA		36 Sampel	36 Sampel	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran yang ditanggulangi	2 Lokasi	NA	NA	NA	NA	2 Lokasi	2 Lokasi	100
1.03.2.02.01.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah papan informasi	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	100
		Jumlah peserta sosialisasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan Lingkungan	-	NA	NA	NA		-	-	
		Jumlah papan himbauan yang diadakan	4 Unit	NA	14 Unit	14 Unit		4 Unit	4 Unit	
		Jumlah publikasi informasi pada media cetak/elektronik	-	NA	NA	NA		-	-	
1.03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sumber pencemaran/kerusakan yang dipulihkan	2 Lokasi	NA	NA	NA	NA	2 Lokasi	2 Lokasi	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali	NA	NA	NA	NA	4 Kali	4 Kali	100
		Jumlah bibit ikan yang diadakan	20000 Ekor	NA	NA	NA		20000 Ekor	20000 Ekor	
1.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	51,18	NA	NA	NA	NA	51,18	51,18	100
1.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH yang dikelola	23,73%	NA	NA	NA	NA	23,73%	23,73%	100
1.04.2.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas taman yang dibangun	-	NA	NA	NA	NA	-	-	100
		Jumlah bibit tanaman yang diadakan untuk RTH	450 Batang	NA	NA	NA		450 Batang	450 Batang	
		Jumlah alat pengelolaan RTH yang diadakan	2 Unit	NA	NA	NA		2 Unit	2 Unit	
		Jumlah tenaga pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang menerima upah	1500 OB	NA	NA	NA		1500 OB	1500 OB	
1.04.2.01.05.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah bibit tanaman yang diadakan untuk taman keanekaragaman hayati Lainnya	48070 Bibit	NA	NA	NA	NA	48070 Bibit	48070 Bibit	100
		Jumlah sumur resapan yang dibangun	-	NA	NA	NA		-	-	
1.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)	Persentase penghasil limbah B3 yang difasilitasi	45%	NA	NA	NA	NA	45%	45%	100
1.05.2.01.	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang disimpan	500 Ton	NA	NA	NA	NA	500 Ton	500 Ton	100
1.05.2.01.01.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Verifikasi Lapangan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dilakukan	20 Kali	NA	NA	NA	NA	20 Kali	20 Kali	100

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	42,80%	NA	NA	NA	NA	42,80%	42,80%	100
2.11.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	18 Perusahaan	NA	NA	NA	NA	18 Perusahaan	18 Perusahaan	100
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina/ diawasi	18 Usaha	NA	NA	NA	NA	18 Usaha	18 Usaha	100
		Jumlah peserta sosialisasi pelaporan Izin lingkungan	40 Orang	NA	NA	NA		40 Orang	40 Orang	
2.11.07.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengakuan keberadaan MHA/kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH yang ditetapkan dengan PERKADA	5%	NA	NA	NA	NA	5%	5%	100
2.11.07.2.02.	Peningkatan Kapasitas MHA Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	1 Kali	NA	NA	NA	NA	1 Kali	1 Kali	100
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah peserta pembinaan/ pendampingan Kelestarian Lingkungan	40 Orang	NA	NA	NA	NA	40 Orang	40 Orang	100
		Jumlah fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan	-	NA	NA	NA		-	-	
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang peduli lingkungan	10%	NA	NA	NA	NA	10%	10%	100
2.11.08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	8 Kali	NA	NA	NA	NA	8 Kali	8 Kali	100
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga (kelompok masyarakat) yang dibina	2 Kelompok	NA	2 Kelompok	2 Kelompok	100	2 Kelompok	2 Kelompok	100
		Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat yang didiklat/dibina/ disosialisasi terkait peduli lingkungan	-	NA	NA	NA		NA	NA	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga/ kelompok Gerakan Lingkungan Hidup yang didampingi	35 Lembaga	NA	NA	NA	NA	35 Lembaga	35 Lembaga	100
1.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga masyarakat/kelompok masyarakat/perseorangan peduli lingkungan yang mendapatkan penghargaan di tingkat Nasional/Propinsi	10%	NA	NA	NA	NA	10%	10%	100
1.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan Hidup	2 Kali	NA	NA	NA	NA	2 Kali	2 Kali	100
1.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan yang diselenggarakan	2 Kali	NA	NA	NA	NA	2 Kali	2 Kali	100
1.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/ kota	2 Kali	NA	NA	NA	NA	2 Kali	2 Kali	100
1.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	2 Kasus	NA	1 Kali	1 Kali	100	2 Kasus	2 Kasus	100
		Jumlah Peserta Sosialisasi Tata cara Pengaduan	40 Orang	NA	NA	NA		40 Orang	40 Orang	
1.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah yang dikelola	40%	NA	NA	NA	NA	40%	40%	100
1.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	Jumlah penanganan timbulan sampah	19.690 m ³	NA	NA	NA	NA	19.690 m ³	19.690 m ³	100
		Jumlah pengurangan timbulan sampah	24.580 Ton	NA	NA	NA		24.580 Ton	24.580 Ton	
1.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah pembayaran tenaga kebersihan jalan fasilitas umum	1560 Kali	NA	1560 Kali	1560 Kali	100	1560 Kali	1560 Kali	100
		Jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan kebersihan yang diadakan	9245 Buah	NA	NA	NA		9245 Buah	9245 Buah	
1.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/penyuluhan pengolahan sampah	75 Orang	250 Orang	455 Orang	455 Orang	100	75 Orang	75 Orang	100

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi Program pada Renja Tahun 2021, yaitu :

1. Terdapat 2 Program yang realisasinya dibawah target yang telah ditetapkan :
 1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan indikator persentase layanan pengelolaan persampahan pada Tahun 2021 ditargetkan 24.88% terealisasi sebesar 24,42%. Hal ini dikarenakan refocusing dan efisiensi anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19.
 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2021 ditargetkan 56.57 dan 84.37 terealisasi sebesar 53.70 dan 83.99. Hal ini dikarenakan masih adanya pencemaran air dan udara yang diakibatkan antara lain aktivitas sumber pencemar yang beragam, kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pencemaran air, peningkatan jumlah usaha/kegiatan dan jumlah kendaraan bermotor.
 2. Terdapat 5 Program yang target dan realisasinya tidak terisi, yaitu Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup serta Program Pengelolaan Persampahan dikarenakan adanya pemetaan Indikator Kinerja berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 17 Tahun 2021 dan Permendagri No. 18 Tahun 2020.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sehat dan tangguh bencana merupakan target program dari Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui beberapa program kegiatan yang berkaitan dan saling mendukung. Kegiatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, antara lain :

1. Memberikan bimbingan dan penyiapan pengisian dokumen lingkungan kepada masyarakat dan atau dunia usaha dalam melaksanakan suatu permohonan usaha dan atau kegiatan melalui manajemen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen AMDAL, UKL/UPL dan atau SPPL dan DPPL;
2. Memberikan rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL, SPPL, DPPL) kepada pelaku dunia usaha dan atau kegiatan yang meliputi pengelolaan limbah, pemanfaatan limbah serta gangguan lingkungan (HO) terhadap masyarakat yang terkena dampak usaha atau kegiatan;
3. Bantuan penyelesaian konflik/sengketa lingkungan;
4. Pembinaan sekolah yang berwawasan lingkungan, dengan mengikuti lomba calon sekolah adiwiyata;
5. Mewujudkan kota Ngawi yang Bersih, sehat dan nyaman menerapkan prinsip-prinsip Good governance dengan ikut lomba program ADIPURA;
6. Meningkatkan partisipasi dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, dengan menjaring calon-calon penerima penghargaan Kalpataru;
7. Menciptakan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup dengan menyelenggarakan lomba-lomba bertema lingkungan hidup;

8. Menyediakan kebutuhan akan data dan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
9. Meningkatkan pengendalian pencemaran Lingkungan dengan memberikan sosialisasi dan bantuan IPAL USK bagi usaha.
10. Meningkatkan pengurangan Sampah dengan fasilitasi terbentuknya Bank Sampah serta memberikan bantuan sarana dan parasrana pendukungnya.
11. Meningkatkan ketersediaan Air tanah dengan meningkatkan konservasi serta perlindungan sumber daya alam.
12. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan Gerakan Ngawi Hijau.
13. Meningkatkan Kualitas Ruang terbuka Hijau yang ramah anak, ramah disabilitas, dengan kegiatan pengembangan Ruang terbuka Hijau
14. Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ngawi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-		79,75	80,05	80,10	80,15	79,75	80,05	80,10	80,15	Hasil penghitungan pada Kertas Kerja Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		66,64	66,71	66,78	66,85	65,44	66,71	66,78	66,85	$(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	-		45,25	47,45	48,95	50,45	45,25	47,45	48,95	50,45	Nilai Pengurangan Sampah Plastik + Nilai Kinerja Fasilitas Pengelolaan Sampah Sebelum Masuk TPA 2

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi, pencapaian visi misi Kabupaten Ngawi menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam salah satu misi yakni misi ke 4 merupakan misi yang sangat terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah pendukung dalam upaya pencapaiannya. Misi dimaksud adalah "Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan". Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan. Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi yakni meningkatnya Implementasi SAKIP perangkat daerah dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tanggap terhadap perubahan iklim. Dalam mencapai peran yang diharapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ngawi yang masih menjadi permasalahan adalah :

- 1) Tidak terkendalinya penggunaan produk tidak ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan sampah sulit untuk diurai
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih menjadi persoalan tersendiri.
- 3) Kondisi infrastruktur prasarana wilayah yang kurang memadai;
- 4) Penurunan debit air yang disebabkan oleh penggundulan hutan dan perubahan iklim global;
- 5) Kegiatan penebangan hutan dan kegiatan pertanian yang tidak memakai konsep teknologi konservasi tanah terutama pertanian lahan kering di tambah dengan kegiatan pemupukan yang tidak seimbang dan pemakaian pestisida yang berlebihan sehingga tingkat erosi masih sangat tinggi hal ini akan menambah lebih besar lahan kering;
- 6) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan/usaha masih belum nampak optimal;
- 7) Peningkatan eksploitasi pertambangan rakyat khususnya bahan galian golongan C di Kabupaten Ngawi yang tidak mempunyai ijin, hal ini sangat mengkhawatirkan serta menyebabkan bergesernya ekosistem serta merusak struktur tanah yang mengakibatkan longsor;
- 8) Peningkatan eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah yang kurang terkendali dari kelompok usaha maupun perorangan untuk usaha rumah tangga ataupun pertanian sehingga menyebabkan adanya infiltrasi konsolidasi terhadap struktur tanah;
- 9) Peningkatan pemanfaatan energi yang berlebihan dari masyarakat awam dan pengusaha nakal tanpa memperhatikan ekosistem dan lingkungan;
- 10) Peningkatan suhu udara di dalam kota yang semakin panas diakibatkan dari berkurangnya daerah resapan kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman-taman dalam kota kabupaten dan kota Kecamatan.
- 11) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah dan buangan gas yang benar serta kewajiban dan tanggungjawab secara yuridis dan sosial di dalam masyarakat dalam suatu kegiatan atau usaha.
- 12) Pembangunan industri dan fasilitas umum yang tidak memperhatikan ruang terbuka hijau dengan sistem infiltrasi air ke dalam tanah, karena kebanyakan area terbuka yang dimiliki dibuat paving atau aspal sehingga menyebabkan aliran permukaan besar dan menyebabkan peningkatan suhu dengan kelembaban udara yang semakin rendah.

Berdasarkan isu-isu yang terjadi di Kabupaten Ngawi, permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara;
2. Rendahnya penerapan pengurangan sampah dengan metode 3R yakni reduce, reuse, and recycle;
3. Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
4. Belum adanya Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) air pada badan air di Kabupaten Ngawi;
5. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar;
6. Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
7. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
8. Pemanasan global yang diakibatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
9. Perubahan fungsi lahan serta rendahnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
10. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan lingkungan hidup.

Selain dari permasalahan tersebut yang harus dihadapi adalah permasalahan keterbatasan SDM dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan SDM ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan.

Selain itu keterlibatan dan keikutsertaan instansi terkait dalam koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang lingkungan hidup yang menyebabkan hal tersebut menjadi permasalahan khusus adalah karena adanya kepentingan yang berbeda-beda dari para pengambil kebijakan di masing-masing instansi.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten;
- b. Masih minimnya regulasi daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Adanya Perda pengelolaan Lingkungan hidup yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Ngawi dan menerapkan perijinan dan meningkatkan pengawasan industri penghasil limbah;
- e. Mulai tumbuhnya kesadaran dan dukungan masyarakat akan kebutuhan untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan berkualitas;
- f. Munculnya LSM yang peduli dengan pengelolaan lingkungan hidup serta organisasi masyarakat pemerhati lingkungan;
- g. Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan berbasis lingkungan oleh Pemerintah daerah;
- h. Isu lingkungan yang telah menjadi isu global dan meningkatnya tuntutan terhadap kegiatan yang berwawasan lingkungan.

- i. Pengawasan terhadap fungsi badan air / sungai sebagai fungsi sungai / drainase bukan sebagai tempat pembuangan limbah/sampah secara langsung.
- j. Mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya air dan industri yang ramah lingkungan. Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan antara lain:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya pencegahan perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 - d. Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran limbah B3 melalui Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - e. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola serta memantau lingkungan hidup sesuai yang tertuang pada dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) melalui Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - f. Meningkatkan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH melalui Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
 - g. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup melalui Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - h. Meningkatkan kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - i. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - j. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah dan berupaya untuk meningkatkan nilai guna dari sampah melalui Program Pengelolaan Persampahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup periode 2022-2026 yang telah disusun, dan direview atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan kebutuhan dan menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal tersebut sebagai upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung fungsi perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Ngawi.

Review terhadap rancangan awal dilakukan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dimana dari hasil review yang dilakukan, program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

ma PD : Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		Persentase layanan pengelolaan sampah	28,11%	814.000	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		Persentase layanan pengelolaan sampah	28,11%	814.000	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	16,01%	814.000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	16,01%	814.000	
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Ngawi	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	400 Rumah Tangga	814.000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Ngawi	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	400 Rumah Tangga	814.000	
		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	2 Unit				Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	2 Unit		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	15.315.637,774	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	15.315.637,774	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Persentase Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	100%	56.700	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Persentase Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	100%	56.700	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	30.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	30.700	
		Jumlah peserta yang mengikuti forum perangkat daerah	50 Orang				Jumlah peserta yang mengikuti forum perangkat daerah	50 Orang		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.500	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	12.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	12.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	12.522.643,298	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	12.522.643,298	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4004 Kali	12.512.643,298	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4004 Kali	12.512.643,298	
		Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 Dokumen				Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	7.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	7.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100%	306.880	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100%	306.880	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DLH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	36.180	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DLH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	36.180	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DLH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	80.700	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DLH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	80.700	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	100.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	100.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	90.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	90.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	311.923,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	311.923,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	104.177	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	104.177	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.373	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.373	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.000	
		Jumlah barang yang digandakan	7828 Lembar				Jumlah barang yang digandakan	7828 Lembar		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	6.360	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	6.360	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	20.700	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	20.700	
		Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	300 Kotak				Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	300 Kotak		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	134.313	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	134.313	
		Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	700 Kotak				Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	700 Kotak		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase administrasi barang milik daerah yang difasilitasi dalam setahun	100%	123.135,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase administrasi barang milik daerah yang difasilitasi dalam setahun	100%	123.135,000	
Pengadaan Mebel	DLH	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	18.067	Pengadaan Mebel	DLH	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	18.067	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	16 Unit	105.068	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	16 Unit	105.068	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	529.108,476	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	529.108,476	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH	Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	3 Kali	399.306,476	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH	Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	3 Kali	399.306,476	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	312 Laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	312 Laporan		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	258 Laporan	117.802	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	258 Laporan	117.802	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	1.465.248	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	1.465.248	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	32.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	32.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	242 Unit	1.285.478	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	242 Unit	1.285.478	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70Unit	27.770	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70Unit	27.770	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	120.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	120.000	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Dokumen Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	70%	180.500	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Dokumen Lingkungan Hidup yang yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	70%	180.500	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		Cakupan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun	2 Dokumen	180.500	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		Cakupan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun	2 Dokumen	180.500	
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	180.500	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	180.500	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air (IKA)	56,67	1.521.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air (IKA)	56,67	1.521.000	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,57				Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,57		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase sampel pengujian kualitas air yang memenuhi baku mutu dengan parameter BOD, COD, TSS, DO, fosfat, pH, nitrat dan total coliform	28,57%	531.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase sampel pengujian kualitas air yang memenuhi baku mutu dengan parameter BOD, COD, TSS, DO, fosfat, pH, nitrat dan total coliform	28,57%	531.000	
		Persentase sample pengujian kualitas udara yang memenuhi baku mutu dengan parameter NO2 dan SO2	75%				Persentase sample pengujian kualitas udara yang memenuhi baku mutu dengan parameter NO2 dan SO2	75%		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	421.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	421.000	
		Jumlah alat pemantauan yang diadakan	0 Unit				Jumlah alat pemantauan yang diadakan	0 Unit		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	110.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	110.000	
		Jumlah lokasi proklamasi	1 Lokasi				Jumlah lokasi proklamasi	1 Lokasi		
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase pencemaran dan/kerusakan Lingkungan Hidup yang ditanggulangi	22,22%	800.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase pencemaran dan/kerusakan Lingkungan Hidup yang ditanggulangi	22,22%	800.000	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	24 Laporan	60.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	24 Laporan	60.000	
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Ngawi	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	10 Titik	740.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Ngawi	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	10 Titik	740.000	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase Pencemaran dan/kerusakan Lingkungan Hidup yang dipulihkan	22,22%	190.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase Pencemaran dan/kerusakan Lingkungan Hidup yang dipulihkan	22,22%	190.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	20 Dokumen	105.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	20 Dokumen	105.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	18 Dokumen	85.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	18 Dokumen	85.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Indeks Kualitas Lahan	51,23	7.427.238,656	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Indeks Kualitas Lahan	51,23	7.427.238,656	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase RTH yang dikelola	23,73%	7.427.238,656	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase RTH yang dikelola	23,73%	7.427.238,656	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Ngawi	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	6.252.077,656	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Ngawi	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	6.252.077,656	
		Jumlah bibit tanaman yang diadakan untuk RTH	1181 Bibit				Jumlah bibit tanaman yang diadakan untuk RTH	1181 Bibit		
		Jumlah alat pengelolaan RTH yang diadakan	139 Unit				Jumlah alat pengelolaan RTH yang diadakan	139 Unit		
		Jumlah tenaga pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang menerima upah	1.500 OB				Jumlah tenaga pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang menerima upah	1.500 OB		
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kab. Ngawi	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	1.175.161	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kab. Ngawi	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	1.175.161	
		Jumlah bibit tanaman yang diadakan untuk taman keanekaragaman hayati Lainnya	26.498 Bibit				Jumlah bibit tanaman yang diadakan untuk taman keanekaragaman hayati Lainnya	26.498 Bibit		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)		Persentase penghasil limbah B3 yang difasilitasi	50%	100.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)		Persentase penghasil limbah B3 yang difasilitasi	50%	100.000	
Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah limbah B3 yang disimpan	525 Ton	100.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah limbah B3 yang disimpan	525 Ton	100.000	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Ngawi	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen	50.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Ngawi	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen	50.000	
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15 Laporan	50.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15 Laporan	50.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	45%	250.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	45%	250.000	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase usaha dan/kegiatan yang diawasi	20%	250.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase usaha dan/kegiatan yang diawasi	20%	250.000	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	2,78%				Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	2,78%		
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Ngawi	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	127.798	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Ngawi	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	127.798	
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Ngawi	Jumlah ASN yang dilatih dan dilantik menjadi PPLHD	1 Orang	35.986.500	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Ngawi	Jumlah ASN yang dilatih dan dilantik menjadi PPLHD	1 Orang	35.986.500	
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan	86.215,500	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan	86.215,500	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Persentase pengakuan keberadaan MHA/kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH yang ditetapkan dengan PERKADA	20%	180.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Persentase pengakuan keberadaan MHA/kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH yang ditetapkan dengan PERKADA	20%	180.000	
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase MHA/kearifan lokal yang dibina	10%	123.712	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase MHA/kearifan lokal yang dibina	10%	123.712	
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	123.712	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	123.712	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Kapasitas MHA Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH		Persentase MHA/kearifan lokal yang difasilitasi	10%	56.288	Peningkatan Kapasitas MHA Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH		Persentase MHA/kearifan lokal yang difasilitasi	10%	56.288	
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	56.288	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	56.288	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang peduli lingkungan	20%	345.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang peduli lingkungan	20%	345.000	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina/dilatih	12%	345.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina/dilatih	12%	345.000	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ngawi	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	35 Lembaga	75.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ngawi	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	35 Lembaga	75.000	
Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	Kab. Ngawi	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	195.000	Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	Kab. Ngawi	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	195.000	
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Ngawi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang	75.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Ngawi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang	75.000	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase lembaga masyarakat/kelompok masyarakat/perseorangan peduli lingkungan yang mendapatkan penghargaan di tingkat Nasional/Propinsi	11%	195.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase lembaga masyarakat/kelompok masyarakat/perseorangan peduli lingkungan yang mendapatkan penghargaan di tingkat Nasional/Propinsi	11%	195.000	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat peduli lingkungan yang dinilai	12%	195.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat peduli lingkungan yang dinilai	12%	195.000	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Ngawi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	12 Entitas	195.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Ngawi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	12 Entitas	195.000	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	80.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	80.000	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	80.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	80.000	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	5 Kasus	80.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	5 Kasus	80.000	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase timbulan sampah yang dikelola	45%	6.022.000,125	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase timbulan sampah yang dikelola	45%	6.022.000,125	
Pengelolaan Sampah		Persentase penanganan timbulan sampah	24,57%	6.022.000,125	Pengelolaan Sampah		Persentase penanganan timbulan sampah	24,57%	6.022.000,125	
		Persentase pengurangan timbulan sampah	25,11%					Persentase pengurangan timbulan sampah		25,11%
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	50.000	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	50.000	
Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3 Laporan	312.506	Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3 Laporan	312.506	
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	132771,7 Ton	2.888.248,625	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	132771,7 Ton	2.888.248,625	
		Jumlah pembayaran tenaga kebersihan jalan dan Fasilitas umum	1620 Orang				Jumlah pembayaran tenaga kebersihan jalan dan Fasilitas umum	1620 Orang		
		Jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan kebersihan yang diadakan	17502 Unit				Jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan kebersihan yang diadakan	17502 Unit		
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Ngawi	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	45 Kelompok	337.063	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Ngawi	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	45 Kelompok	337.063	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	53 Unit	2.434.182,500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	53 Unit	2.434.182,500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi untuk bahan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituangkan dalam usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut diatas, hasil penelaahan terhadap kesesuaian program,kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel 2.5. sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Indeks Kualitas Lahan (IKL)		
1.	Bibit Asam Jawa	Desa Ngancar, Kec. Pitu		2000 Batang	
2.	Bibit Asam Jawa	Desa Jatimulyo, Kec. Mantingan		2000 Batang	
3.	Bibit Glodokan Pecut	Desa Kendal, Kec. Kendal		2000 Batang	
4.	Bibit Sengon Laut	Desa Sidorejo, Kec. Kendal		2000 Batang	
5.	Bibit Kayu Putih	Desa Palang Kidul, Kec. Kedunggalar		2000 Batang	
6.	Bibit Jati TBT/TBS	Desa Cantel, Kec. Pitu		2000 Batang	
7.	Bibit Sengon Laut	Desa Pucangan, Kec. Ngrambe		2000 Batang	
8.	Bibit Glodokan Pecut	Desa Sidomakmur, Kec. Widodaren		2000 Batang	
9.	Bibit Glodokan Pecut	Desa Bangunrejo, Kec. Kedunggalar		2000 Batang	
10.	Bibit Sengon Laut	Desa Hargosari, Kec. Sine		2000 Batang	
11.	Bibit Jati TBT/TBS	Desa Wownokerto, Kec. Kedunggalar		2000 Batang	
12.	Bibit Ketapang	Desa Sidomulyo, Kec. Ngrambe		2000 Batang	
13.					
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air (IKA) kategori baik		
1	Reaktor Biogas	Desa Sekaralas, Kec. Widodaren		2 Unit	
2	Reaktor Biogas	Desa Wonokerto, Kec. Kedunggalar		2 Unit	
3	Reaktor Biogas	Desa Jaten, Kec. Jogorogo		2 Unit	

1	2	3	4	5	6
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase timbulan sampah yang dikelola/tertangani		
	1 Pembangunan Bank Sampah	Desa Grudo, Kec. Ngawi		1 Unit	
	2 Pembangunan Bank Sampah	Desa Dempel, Kec. Geneng		1 Unit	
	3 Pembangunan Bank Sampah	Kelurahan Karangtengan, Kec. Ngawi		1 Unit	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan,
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Prioritas Nasional 1: Meningkatkan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas mempunyai arah kebijakan antara lain : (a) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (b) Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi melalui revitalisasi danau difokuskan pada 15 danau prioritas nasional, yaitu: Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Rawa Danau, Danau Rawa Pening, Danau Batur, Danau Sentarum, Danau Kaskade Mahakam (Semayang-Melintang-Jeumpang), Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, dan Danau Sentani; (c) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; (d) Peningkatkan nilai tambah pariwisata. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah kebijakan mengenai pengembangan kawasan perkotaan, khususnya pemindahan Ibu Kota Negara yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur. Prioritas Nasional 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing mempunyai arah kebijakan antara lain : (a) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga; (b) Reforma agraria; (c) Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan social; (d) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; (e) Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi; (f) Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi; (g) Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi; (h) Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi; (i) Peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan penciptaan inovasi. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim mempunyai arah kebijakan antara lain : (a) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (b) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (c) pembangunan rendah karbon.

Adapun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Ngawi terkait kebijakan nasional adalah :

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Pengelolaan sampah dengan 3R (Reduce, reuse, Recycle).
4. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan.
6. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
7. Pemulihan sungai dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air.

8. Peningkatan efektifitas penegakan hokum lingkungan hidup.
9. Peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan LHK untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing SDM LHK.

Adapun kesesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel . 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi

NO	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A.	Nasional	Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
1	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup		Mengendalikan pencemaran udara, air, kerusakan pesisir dan laut, kerusakan lahan gambut, kerusakan lahan akses terbuka
2	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Meningkatkan penanganan sampah, melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar 30% dari proyeksi timbulan sampah, melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut melalui penanganan sampah di kab/kota, kawasan konservasi dan destinasi wisata prioritas pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu, meningkatkan pengelolaan B3, melakukan Verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3, melakukan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan Non B3, meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi dan non-institusi serta menerapkan sistem tanggap darurat limbah B3 di seluruh provinsi di Indonesia
3	Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup		fasilitasi dan koordinasi pemulihan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) yang terdegradasi di 7 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan pence dengan luasan 1,5 juta hektar, pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan berkas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3, pemulihan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk padang lamun, terumbu karang, dan vegetasi pantai.
4	Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah		Pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan/atau kegiatan melalui penetapan RPPLH, DDDT Lingkungan Hidup nasional, KLHS dan peta ekoregion nasional yang menjadi acuan pemerintah, peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, AMDAL dan UKL/UPL, penyiapan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyiapan pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk TORA dan lain-lain

B.	Propinsi	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur	
1	Pengelolaan Sumber Daya Air		Permasalahan utama didalam upaya pengelolaan sumber daya air adalah permasalahan kuantitas air dan kualitas air yang semakin menurun, hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, untuk penurunan kuantitas air disebabkan oleh ketersediaan air bervariasi menurut iklim, berfungsinya daerah resapan menjadi daerah pemukiman dan industri, terganggunya fungsi kawasan sebagai penyimpan air, terganggunya fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan resapan, degradasi lahan, kesalahan dalam pengelolaan sempadan sungai dan lingkungan sungai. Untuk penurunan kualitas sumber air disebabkan oleh tingkat pencemaran air, badan air sebagai pembuangan akhir limbah, tingginya kadar sedimen akibat erosi, intrusi laut.
2	Pengelolaan Limbah B3		Potensi limbah B3 yang sangat tinggi apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi masalah bagi kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.
3	Pengelolaan hutan, lahan		Kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kelangkaan sumber air/mata air. Kecenderungan ini telah tampak pada indikator menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tekanan penduduk maupun bencana alam, dan pemanfaatan berlebihan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungannya. Kasus pembalakan hutan secara liar, erosi dan longsor, rusaknya habitat biota, menurunnya biodiversitas, banjir dan kekeringan, berubahnya iklim, kebakaran hutan, masalah dampak sosial ekonomi akibat eksploitasi dan sebagainya, telah menjadikan masalah laten yang memerlukan pendekatan holistik dan bertahap guna menyelesaikan atau menangani masalah ini.
4	Pengendalian Pencemaran Udara		Pencemaran lingkungan, baik dalam media lingkungan air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat asas dan terus menerus. Upaya pemulihan dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.
5	Permasalahan pengelolaan kawasan pesisir		Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan di kawasan pesisir dan lautan di Indonesia antara lain: pencemaran, kerusakan fisik habitat, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, abrasi pantai, konversi kawasan lindung ke penggunaan lainnya,

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Lingkungan Hidup, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Ngawi perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan tangguh bencana	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80.10
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tanggap terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66.78
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	48.95

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu ditetapkan program-program yang mengacu pada keinginan dalam rumusan setiap sasaran yang tercermin dalam indikator-indikatornya. Program pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/SPA
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.
 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Melalui Media Tanah, Air, Udara Dan Laut.
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim.
 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat
 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

- Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA dengan PPLH
- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.
 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.
 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.
11. Program Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan Pengelolaan Sampah
- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali.
 - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Adapun rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	26 Dokumen 4004 Orang/bulan	80.1 Nilai	12,512,643,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	12,636,503,992
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	1 Laporan	80.1 Nilai	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	3,000,000
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	50 Laporan	80.1 Nilai	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	7,000,000
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							244,210,000				228,188,000		
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	1 Paket	80.1 Nilai	36,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	79,088,000
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		100 %	18 Orang	80.1 Nilai	8,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	24,100,000
2	11	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		100 %	500 Orang	80.1 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	0
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		100 %	60 Orang	80.1 Nilai	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	125,000,000
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							321,353,000				383,490,250		
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	4 Paket	80.1 Nilai	13,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	9,938,600
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	1 Paket	80.1 Nilai	110,973,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	175,207,850
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	4 Paket	80.1 Nilai	16,007,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	19,722,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah barang yang digandakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		100 %	7828 Lembar 4 Paket	80.1 Nilai	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	17,586,800
2	11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	48 Dokumen	80.1 Nilai	6,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	15,720,000
2	11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah mamin kunjungan tamu yang yang disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	10 Laporan 300 Kotak	80.1 Nilai	20,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	5,190,000
2	11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah mamin rapat SKPD yang disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		100 %	130 Laporan 700 Kotak	80.1 Nilai	134,313,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	140,125,000
2	11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								99,572,000					170,217,850
2	11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		100 %	3 Unit	80.1 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	50,000,000
2	11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	3 Unit	80.1 Nilai	9,052,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	20,000,000
2	11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	16 Unit	80.1 Nilai	90,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	100,217,850
2	11 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	1 Unit	80.1 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	0
2	11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								509,883,212					500,661,221
2	11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah surat yang dikirim	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		100 %	48 Surat	80.1 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	2,000,000
2	11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	100 %	3 Kali 312 Laporan	80.1 Nilai	380,081,212	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	100 %	349,999,921

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	Jumlah alat pemantauan yang diadakan Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56.67 Nilai 84.57 Nilai	0 Unit 3 Dokumen	66.78 Nilai	1,456,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	56.67 Nilai 84.57 Nilai	431,000,000
2	11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah lokasi proklamasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56.67 Nilai 84.57 Nilai	1 Dokumen 1 Desa	66.78 Nilai	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	56.67 Nilai 84.57 Nilai	30,000,000
2	11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								313,521,000					870,000,000
2	11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56.67 Nilai 84.57 Nilai	24 Laporan	66.78 Nilai	52,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	56.67 Nilai 84.57 Nilai	60,000,000
2	11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56.67 Nilai 84.57 Nilai	10 Titik	66.78 Nilai	261,521,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	56.67 Nilai 84.57 Nilai	810,000,000
2	11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								19,000,000					190,000,000
2	11 03 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56.67 Nilai 84.57 Nilai	20 Dokumen	66.78 Nilai	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	56.67 Nilai 84.57 Nilai	105,000,000
2	11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56.67 Nilai 84.57 Nilai	18 Dokumen	66.78 Nilai	19,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	56.67 Nilai 84.57 Nilai	85,000,000
2	11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								4,574,694,000					7,197,240,000
2	11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								4,574,694,000					7,197,240,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah alat pengelolaan RTH yang diadakan Jumlah bibit tanaman yang diadakan untuk RTH Jumlah tenaga pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang menerima upah Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		51.23 Nilai	139 Unit 1181 Bibit 1500 OB 0 Ha	66.78 Nilai	3,374,694,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51.23 Nilai	6,022,079,000
2	11 04 2.01 05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah bibit tanaman yang diadakan untuk Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		51.23 Nilai	26498 Bibit 0 Ha	66.78 Nilai	1,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51.23 Nilai	1,175,161,000
2	11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							40,000,000					100,000,000
2	11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3							40,000,000					100,000,000
2	11 05 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		50 %	15 Dokumen	66.78 Nilai	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penghasil Limbah B3 yang difasilitasi	50 %	50,000,000
2	11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		50 %	15 Laporan	66.78 Nilai	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penghasil Limbah B3 yang difasilitasi	50 %	50,000,000
2	11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							242,869,500					285,986,500
2	11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							242,869,500					285,986,500
2	11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	45 %	20 Dokumen	66.78 Indeks	122,653,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	45 %	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	11 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah ASN yang dilatih dan dilantik menjadi PPLHD Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		45 %	1 Orang 0 Orang	66.78 Indeks	35,986,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	45 %	35,986,500
2	11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		45 %	10 Laporan	66.78 Indeks	84,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	45 %	100,000,000
2	11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								86,186,000					180,000,000
2	11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH								86,186,000					100,000,000
2	11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Persentase pengakuan keberadaan MHA/kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH yang ditetapkan dengan PERKADA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		20 %	1 Dokumen	66.78 Indeks	86,186,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengakuan keberadaan MHA/kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH yang ditetapkan dengan PERKADA	20 %	100,000,000
2	11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH								0					80,000,000
2	11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Persentase pengakuan keberadaan MHA/kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH yang ditetapkan dengan PERKADA	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		20 %	1 Dokumen	66.78 Indeks	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengakuan keberadaan MHA/kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH yang ditetapkan dengan PERKADA	20 %	80,000,000
2	11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								236,510,500					345,000,000
2	11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								236,510,500					345,000,000
2	11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Masyarakat/ Kelompok Masyarakat yang Peduli Lingkungan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		20 %	35 Lembaga	66.78 Nilai	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Masyarakat/ Kelompok Masyarakat yang Peduli Lingkungan	20 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Lembaga Masyarakat/ Kelompok Masyarakat yang Peduli Lingkungan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		20 %	1 Dokumen	66.78 Nilai	111,510,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Masyarakat/ Kelompok Masyarakat yang Peduli Lingkungan	20 %	195,000,000
2	11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase Lembaga Masyarakat/ Kelompok Masyarakat yang Peduli Lingkungan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		20 %	100 Orang	66.78 Nilai	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Masyarakat/ Kelompok Masyarakat yang Peduli Lingkungan	20 %	50,000,000
2	11 09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							142,000,000					195,000,000
2	11 09 2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							142,000,000					195,000,000
2	11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Lembaga Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Perseorangan Peduli Lingkungan yang Mendapatkan Penghargaan di tingkat Nasional/Propinsi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		11 %	12 Entitas	66.78 Nilai	142,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Perseorangan Peduli Lingkungan yang Mendapatkan Penghargaan di tingkat Nasional/Propinsi	11 %	195,000,000
2	11 10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							50,000,000					80,000,000
2	11 10 2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							50,000,000					80,000,000
2	11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		100 %	3 Dokumen	66.78 Indeks	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	80,000,000
2	11 11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							3,891,896,700					6,147,477,500
2	11 11 2.01		Pengelolaan Sampah							3,891,896,700					6,147,477,500
2	11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase Timbulan Sampah yang dikelola/tertangani	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)		45 %	1 Dokumen	48.95 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Timbulan Sampah yang dikelola/tertangani	45 %	100,000,000
2	11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Timbulan Sampah yang dikelola/tertangani	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)		45 %	3 Laporan	48.95 Nilai	58,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Timbulan Sampah yang dikelola/tertangani	45 %	578,600,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Timbulan Sampah yang dikelola/tertangani	Jumlah pembayaran tenaga kebersihan jalan dan Fasilitas umum Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan kebersihan yang diadakan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)		45 %	1620 Orang 132771.7 Ton 17502 Unit	48.95 Nilai	2,327,488,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Timbulan Sampah yang dikelola/tertangani	45 %	3,150,000,000
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang dikelola/tertangani	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)		45 %	45 Kelompok	48.95 Nilai	94,254,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Timbulan Sampah yang dikelola/tertangani	45 %	396,177,500
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Timbulan Sampah yang dikelola/tertangani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)		45 %	10 Unit	48.95 Nilai	1,411,681,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Timbulan Sampah yang dikelola/tertangani	45 %	1,922,700,000
TOTAL												27,685,243,582					32,337,885,313	